

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Wacana soal imigrasi menjadi perbincangan yang penting bagi UNHCR. Nasib para migran di negara asal mereka, di sepanjang jalur migrasi dan di negara-negara ketiga tempat mereka tinggal (sementara atau permanen) seringkali sebagian besar dilupakan dan perlindungan serta bantuan mereka tidak perlu ditangani secara memadai. Khususnya, para migran yang tinggal di – atau sedang menyeberang – negara-negara yang terkena dampak konflik bersenjata mungkin sangat rentan. Penelitian ini terutama berusaha untuk menangani kasus migran yang terjebak dalam situasi konflik bersenjata dan bagaimana mereka dilindungi di bawah hukum humaniter internasional (IHL), daripada migran di negara tujuan. Namun, beberapa aturan HHI juga berlaku bagi para migran yang melarikan diri karena alasan yang berkaitan dengan konflik bersenjata dan yang berada di negara tujuan yang damai (Gieseken, 2017).

Pada tesis ini akan membahas tentang bagaimana perkembangan konflik Myanmar yang merupakan konflik local berkembang menjadi konflik yang melibatkan actor internasional. Untuk menjelaskan bahwa konflik Myanmar ini adalah konflik local maka akan dijelaskan secara spesifik konflik yang ada terlebih dahulu yang ada di Myanmar.

Konflik Myanmar hadir sebagai konflik yang memiliki dimensi ekonomi, politik, kultural, militer, perang sipil, dan buruknya pemerintah (*Myanmar's Troubled History: Coups, Military Rule, and Ethnic Conflict | Council on Foreign Relations*, n.d.). Konflik ini berawal ketika Myanmar memiliki pemerintahan yang buruk yang berkaitan dengan konflik politik yang ada (*Myanmar's Troubled History: Coups, Military Rule, and Ethnic Conflict | Council on Foreign Relations*, n.d.). Konflik ini cukup menahun dan tertahan lama sehingga apa yang ada bagi pemerintahan Myanmar menjadi tidak stabil. Untuk perkembangan konflik ini memang tidak murni didasari oleh konflik politik. Salah satu yang terjadi pada tahun 2012 adalah pembunuhan wanita budha oleh pria muslim (International Crisis Group, 2012). Hal ini membawa pada konflik interkomunal yang lebih parah. Untuk menghadapi hal tersebut pemerintah Myanmar memberikahimbauan

meskipun begitu keputusan di tingkat daerah justru memperparah kondisi Myanmar (International Crisis Group, 2012)

Pada aspek ekonomi Myanmar terdapat kasus pengelolaan sumber daya air yang pada kasus tersebut juga diwarnai dengan kondisi konflik kultural (Michel, 2020). Pada kasus tersebut pengelolaan yang ada dipegang oleh pemerintah pusat dengan mekanisme distribusinya tidak cukup baik dimana aspirasi local juga menjadi pengaruh yang kuat dan aspirasi yang ada tidak cukup kompatibel dengan aspirasi pemerintah pusat (Michel, 2020). Pengelolaan air ini meliputi pembangkit listrik dan sumber air bagi kehidupan masyarakat. Namun, liberalisasi ekonomi juga dapat menimbulkan konflik, terutama ketika pertumbuhan ekonomi memperburuk ketidaksetaraan antarkelompok (Sorens dan Ruger, 2015; Midtgard et al., 2017). Hal tersebut terlihat di Myanmar, di mana masuknya dana asing yang besar, ditambah dengan transisi yang sulit dari pemerintahan militer ke demokrasi perwakilan, menempatkan tekanan yang signifikan pada tatanan sosial Myanmar. Tak lama setelah pembukaan, beberapa konflik etnis yang telah lama memanas di negara itu kembali menjadi konflik kekerasan, yang berpuncak pada operasi militer skala besar di negara bagian Rakhine mulai tahun 2014 yang oleh Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Zeid Ra'ad al-Husseini disebut “ contoh buku teks tentang pembersihan etnis,” membunuh atau menggusur lebih dari 700.000 warga (United Nations, 2017; UNHRC, 2018).

Konflik yang berlangsung di Myanmar membawa konflik yang ada menuju konflik internasional (International Crisis Group, 2012). Artinya skala yang ada pada konflik Myanmar berada pada skala yang lebih luas lagi. Sulit untuk menilai jumlah pengungsi internal dan skala masalahnya. Dengan menghitung hanya orang-orang yang telah mengungsi secara paksa sejak tahun 2004, jumlah pengungsi internal di Burma timur tidak akan lebih dari 100.000 (termasuk 25.000 orang yang dipindahkan oleh Tatmadaw di Negara Bagian Karen utara, sejak Februari 2006) (South et al., n.d.). Namun, jumlah orang-orang yang dipindahkan sebelumnya yang tidak ada solusi jangka panjangnya harus dihitung dalam jutaan (South et al., n.d.). Sejak tahun 1996, lebih dari 2.800 desa diketahui telah dihancurkan dan/atau dipindahkan secara massal, atau ditinggalkan, karena aktivitas tatmadaw— termasuk setidaknya 306 desa antara tahun 2002 dan 2005 saja (TBBC 2005b) (South et al., n.d.). Sementara jumlah yang tidak diketahui dari desa-desa ini telah

dimukimkan kembali, sebagian besar tetap tidak berpenghuni. Menurut Konsorsium Perbatasan Burma Thailand (TBBC) dan kelompok mitra lokalnya, ada 540.000 pengungsi internal di Burma timur pada pertengahan hingga akhir tahun 2005 (South et al., n.d.). Angka-angka ini tidak termasuk pengungsi internal Tipe Satu yang memilih untuk tidak menyediakan diri untuk bersenjata. Kelompok oposisi, atau sejumlah besar orang yang telah mencapai setidaknya solusi semitahan lama untuk penderitaan mereka. Mereka juga tidak termasuk ratusan ribu pengungsi Tipe Dua dan Tiga di bagian lain Burma (South et al., n.d.).

Begitu juga pada aspek militer konflik Myanmar memiliki rentetan yang panjang. Konflik di Myanmar telah digambarkan sebagai salah satu konflik bersenjata terpanjang di dunia (Bächtold et al., 2022). Selama lebih dari 60 tahun, negara ini telah terlibat dalam perang saudara antara lusinan organisasi bersenjata etnis (EAO) dan pemerintah Myanmar (dalam konfigurasi yang berbeda yang berkisar dari pemerintahan demokrasi parlementer pascakolonial hingga rezim militer satu partai) (Bächtold et al., 2022). Sekitar 30 persen warga negara Myanmar memandang diri mereka sebagai bangsa etnis yang berbeda dengan hak mereka sendiri untuk menentukan nasib sendiri dan perlakuan yang sama, dan telah memperjuangkan hak-hak ini sejak awal kemerdekaan Myanmar. Konflik bersenjata antara EAO (kadang-kadang, lebih dari 50 EAO beroperasi di daerah perbatasan) dan pemerintah Myanmar juga terjalin erat dan saling konstitutif dengan pengaruh kuat dari *Tamaw* (tentara Myanmar) (Bächtold et al., 2022). Lebih dari setengah abad konflik bersenjata telah terbukti sangat merugikan lanskap politik, sosial, dan ekonomi negara. Budaya ketakutan dan ketidakpercayaan tingkat tinggi telah mengakar sendiri melalui generasi warga yang terjebak di tengah kekerasan antara pemerintah dan EAO. Konflik berlipat ganda ditandai dengan pelanggaran hak asasi manusia yang meluas dan serius serta tingkat pengungsian yang tinggi: pada tahun 2014, UNHCR telah melaporkan 230.000 pengungsi internal (IDP) di tenggara saja, dengan perkiraan 128.000 pengungsi yang tinggal di Thailand- perbatasan Myanmar (Bächtold et al., 2022).

Proses perdamaian yang dibangun pun mengalami mekanisme yang tidak mudah. Memahami Proses Perdamaian Myanmar: Perjanjian Gencatan Senjata, ditulis oleh Min Zaw Oo dari MPC (dalam kapasitas pribadinya). Ini memberikan gambaran mendalam tentang proses-proses tentang senjata Myanmar, yang ditulis

oleh seorang individu yang terlibat langsung dalam percakapan senjata. Kedalaman dan kekhususan pengetahuannya melalui informasi melaluinya yang melaluinya yang merupakan segala sesuatu yang dihadapi oleh 40 kelompok sebelum 2010. Ini sangat penting karena memberikan informasi yang sekarang dapat diakses secara luas oleh aktor lokal, nasional dan internasional setelah bertahun-tahun mendapatkan banyak kontrol, terutama pada isu-isu terkait politik dan keamanan yang sangat sensitif. Kontribusi Masyarakat Sipil untuk Proses Perdamaian Myanmar Saat Ini, yang ditulis oleh SF, adalah publikasi ketiga dari seri ini. Ini untuk mencoba memberikan lebih banyak informasi dan membuat tentang peran yang dimainkan masyarakat sipil dalam perdamaian saat ini di Myanmar. Ini menyangkal anggapan bahwa masyarakat sipil 'mati' di bawah rezim militer, tetapi berpendapat bahwa mereka hanya menemukan alternatif dan cara kerja kreatif yang sekarang unik di negara ini. Melalui studi kasus dan analisis Program Dukungan Proses Perdamaian SF, makalah ini menunjukkan dampak organisasi masyarakat sipil dan organisasi berbasis masyarakat dalam memajukan proses perdamaian. Ini juga merupakan tantangan saat ini untuk membuat partisipasi publik, setelah bertahun-tahun untuk menciptakan budaya dan perlawanan terhadap aksi politik.

UNHCR menjangkau 44.000 rumah tangga (termasuk pengungsi dan orang-orang tanpa kewarganegaraan) dengan barang-barang bantuan inti, mendistribusikan \$2,6 juta dalam bentuk bantuan tunai kepada 17.000 orang yang menjadi perhatian, dan memberikan tempat penampungan darurat kepada 47.000 orang yang menjadi perhatian. Sementara itu, bantuan hukum sangat penting dalam menangani masalah perumahan, tanah dan properti. Di negara bagian Rakhine, UNHCR bekerja untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi pemulangan sukarela para pengungsi dan pengungsi, dan melakukan 95 proyek berdampak cepat dengan UNDP, yang memberi manfaat bagi lebih dari 20.000 orang. UNHCR terus mengadvokasi pelaksanaan rekomendasi 2017 dari Komisi Penasihat Negara Bagian Rakhine (*Myanmar Situation*, n.d.).

Pada kasus Myanmar terdapat gap yang menjadi pertimbangan dalam penyelesaian konflik. Yaitu gap ekonomi militer dan politik itu sendiri. Bagi Myanmar apa yang menjadi bagian terpenting adalah tentang keberlanjutan konflik ini untuk diselesaikan. Apa yang terbaik bagi Myanmar (*Myanmar Situation*, n.d.).

Bagi pemerintah dan militer, gencatan senjata bilateral merupakan langkah menuju kelompok-kelompok yang menandatangani perjanjian gencatan senjata nasional, yang merupakan prasyarat untuk berpartisipasi dalam dialog politik yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan damai komprehensif yang akan mengakhiri konflik Myanmar. Bagi Aliansi Persaudaraan, gencatan senjata bilateral lebih merupakan sarana untuk mengamankan pengakuan politik, memperkuat keuntungan teritorial dan berpotensi mendapatkan akses ke peluang ekonomi baru. Namun, syarat-syarat gencatan senjata bilateral yang diusulkan dengan anggota Aliansi Persaudaraan telah menjadi masalah. Kelompok-kelompok itu mengajukan proposal pada pembicaraan di Muse pada 30 April, mendorong peran formal bagi China. Dua bulan kemudian, pada pertemuan di Mong La di Negara Bagian Shan bagian timur, tim perdamaian pemerintah menanggapi dengan rancangannya, yang pada dasarnya berasal dari militer (ICG, 2019).

Prevalensi model konflik berbasis keserakahan di seluruh dunia cenderung memicu skeptisisme klaim elit untuk mewakili komunitas etnis. Hal ini terutama terjadi di antara badan-badan internasional dan pengamat dengan pengalaman konflik bersenjata dan dampaknya di belahan dunia lain, yang cenderung fokus pada model keserakahan dan ekonomi politik konflik di Burma. Perspektif seperti itu, bagaimanapun, kurang menghargai (sering diperebutkan) legitimasi dari banyak kelompok pemberontak dan gencatan senjata dan meremehkan tingkat dukungan yang mereka nikmati di konstituen mereka. Sebaliknya, pendukung oposisi (khususnya yang berbasis di luar Burma) cenderung menekankan perjuangan melawan rezim yang represif dan model konflik 'keadilan/keluhan yang sah', dan seringkali mendukung agenda etno-nasionalis yang dibuat oleh elit, tanpa mempertanyakan kepentingan siapa mereka. melayani (South et al., n.d.).

Negara bagian Rakhine terletak di Myanmar barat, berbatasan dengan Bangladesh di utara. Mayoritas penduduknya adalah etnis Buddha Rakhine dan tinggal di bagian tengah negara bagian. Rohingya, yang sebagian besar beragama

Islam, secara tradisional tinggal di wilayah utara. Ada juga sejumlah etnis minoritas lainnya.¹⁷ Negara bagian Rakhine secara bersamaan menghadapi krisis hak asasi manusia, keamanan, pembangunan, dan kemanusiaan. Sejak kemerdekaan pada tahun 1948, pemerintah berturut-turut telah menolak untuk mengakui Rohingya sebagai kelompok etnis resmi, menganggap mereka sebagai orang asing. Undang-undang kewarganegaraan Myanmar tahun 1982 mengizinkan pihak berwenang untuk menolak kewarganegaraan Rohingya, membuat mereka secara efektif tidak memiliki kewarganegaraan. Akibatnya, mereka tidak diberi hak untuk memilih dan menghadapi pembatasan apa pun atas kebebasan bergerak dan akses mereka ke pendidikan dan perawatan kesehatan. Mereka telah mengalami diskriminasi dan penindasan ekonomi, sosial, dan agama selama beberapa generasi. Amnesty International telah menggambarkan perlakuan terhadap Rohingya di negara bagian Rakhine sebagai “apartheid.” Laporan Misi Pencari Fakta Internasional Independen di Myanmar pada September 2018 menemukan “alasan yang masuk akal untuk menyimpulkan adanya pengenaan kondisi kehidupan yang diperhitungkan untuk membawa kehancuran fisik kelompok Rohingya, sebagai genocidalact yang mendasari.” PBB, Amerika Serikat, dan lainnya telah menggambarkan taktik pemerintah melawan Rohingya sebagai “pembersihan etnis.” Sementara komunitas lain di Rakhine, khususnya minoritas lainnya, menghadapi pelecehan dan pelanggaran hak asasi manusia mereka, keadaan tanpa kewarganegaraan yang berkepanjangan dan diskriminasi yang mendalam telah membuat Rohingya sangat rentan (Debarre, 2019).

Dalam konteks Myanmar, seperti halnya negara-negara lain dengan sejarah kepemimpinan militer yang sudah berlangsung lama, gagasan "negara" versus "militer" versus "sektor swasta" secara signifikan kabur, memperumit analisis yang berbeda (Woods, 2011). Para pemimpin militer memiliki sejarah panjang di Myanmar dalam menjalankan bisnis dan konglomerat terbesar di negara itu, baik mereka sendiri atau melalui proxy seperti keluarga mereka, dan sebagian besar pembukaan ekonomi negara itu pada 2011–2012 didasarkan pada militer yang melepaskan kekuasaan politik tetapi mempertahankan dan memperluas cengkeraman ekonomi mereka. , sebuah proses yang dimulai pada tahun 2008 (Fordet al., 2016). Yang paling menonjol di antaranya adalah pemimpin pasca-kudeta, jenderal angkatan darat Min Aung Hlaing, yang juga ketua konglomerat

terbesar di negara itu (Union Myanmar Economic Holdings Limited), dan putranya Aung Pyae Sone juga menjalankan konglomerat besar yang menggabungkan bisnis telekomunikasi, restoran, dan layanan obat (Miklian dan Katsos, 2021).

Myanmar menganggap kekerasan di Rakhine sebagai masalah internal, tetapi telah lama memiliki dimensi internasional. Rohingya, begitu mereka menyebut diri mereka, tidak diakui sebagai salah satu etnis resmi oleh pemerintah, yang menyebut mereka sebagai Bengali. Bangladesh menantang istilah ini dan mengatakan bahwa mereka bukan warga negaranya karena mereka telah tinggal di perbatasan Myanmar sejak zaman kolonial, bahkan sebelum Bangladesh sendiri ada sebagai sebuah negara. Dalam beberapa dekade terakhir, operasi melawan apa yang disebut pemerintah Myanmar sebagai “imigran ilegal” menyebabkan puluhan ribu orang melarikan diri ke negara tetangga Bangladesh sebagai pengungsi atau bermigrasi ke negara-negara seperti Malaysia untuk bekerja secara ilegal. Dari sana, yang lain mencari perlindungan di negara ketiga. Meski siap menerima bantuan kemanusiaan dari PBB dan donor bilateral, Myanmar menolak bantuan politik dari luar, termasuk dari Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN). “Myanmar percaya itu adalah masalah internal mereka, tetapi masalah internal Anda bisa menjadi milik kami keesokan harinya jika Anda tidak hati-hati”, Sekretaris Jenderal ASEAN Surin Pituswan memperingatkan pada kunjungan baru-baru ini ke Kuala Lumpur (International Crisis Group, 2012).

Kekerasan telah menyebabkan pemisahan Muslim dan Buddha dalam dua cara. Pertama, karena masyarakat telah pindah atau melarikan diri dari daerah di mana mereka menjadi minoritas dan karenanya merasa rentan – khususnya Rohingya, tetapi juga Ra-khine. Kedua, karena aparat keamanan dalam beberapa kasus telah memaksakan pemisahan komunitas untuk menahan kekerasan – misalnya, mencegah orang Rakhine memasuki wilayah utama Rohingya yang tersisa di Sittwe, dan membatasi akses ke pasar utama oleh Rohingya. Mayoritas pengungsi adalah Muslim Rohingya dari Sittwe perkotaan dan pinggiran kota, yang telah dipindahkan ke kamp-kamp di luar kota, serta pengungsi Rohingya yang baru di bagian lain negara bagian itu dalam gelombang kekerasan terbaru. Komunitas Buddha Rakhine dan Rohingya pada dasarnya telah dipisahkan, termasuk dengan kamp-kamp pengungsian yang terpisah. Berbeda dengan kamp-kamp Rakhine yang terbuka, kamp-kamp Rohingya di sekitar Sittwe secara de facto tertutup, dengan

penduduk yang tidak mampu atau tidak mau pergi ke kota untuk bekerja atau pergi ke pasar. Sebagian besar lingkungan Rohingya di Sittwe mengalami bulldozing pada hari-hari setelah kekerasan, termasuk bangunan yang telah rusak atau hancur oleh api, tetapi juga beberapa bangunan yang masih kokoh. Ada indikasi bahwa pihak berwenang setempat mungkin tidak mengizinkan penduduk asli Rohingya untuk kembali ke daerah-daerah ini, dan bahwa mereka mungkin menggunakan undang-undang era kolonial yang memberdayakan mereka untuk merebut kembali daerah-daerah yang rusak akibat kebakaran sebagai tanah milik negara (International Crisis Group, 2012).

Hal ini juga menimbulkan pertanyaan apakah ketegangan antarkomunitas di tempat lain di negara ini dapat berubah menjadi kekerasan. Myanmar memiliki sejarah perselisihan antarkomunal, khususnya vis-à-vis komunitas India (Muslim dan non-Muslim) dan komunitas Cina. Insiden paling serius telah terjadi dalam konteks situasi tertentu, seperti pada 1930-an selama depresi global dan di tengah kemarahan atas migrasi yang tidak terkendali dari British India, atau pada 1960-an di tengah upaya China untuk meradikalisasi penduduk China di Myanmar pada saat Revolusi Kebudayaan. Pada tahun 2001, kekerasan anti-Muslim pecah di Myanmar tengah, sebagian dipicu oleh penghancuran Buddha Bam-iyon di Afghanistan oleh Taliban, dan biksu Buddha di kota Taungoo, Myanmar tengah, menyerukan penghancuran masjid sebagai pembalasan. Namun, secara umum, populasi Myanmar keturunan Cina dan India terintegrasi dengan baik dan ketegangan atau kekerasan antarkomunal pada tingkat yang terlihat di Negara Bagian Rakhine tampaknya tidak mungkin terjadi. Pengecualian yang mungkin adalah ketegangan dengan migran China yang baru tiba di Mandalay dan utara. Selama dua puluh tahun terakhir, banyak orang dari Cina barat daya datang ke Myanmar untuk mengejar peluang bisnis. Akses mereka ke kredit dan jaringan bisnis di China telah menempatkan mereka pada keuntungan atas bisnis lokal, banyak yang telah mengungsi sebagai akibatnya. Populasi Tionghoa yang lebih baru ini, tidak seperti komunitas Tionghoa yang lebih tua, umumnya tidak terintegrasi dengan baik, yang menyebabkan ketegangan dengan penduduk setempat. Juga, banyak dari migran Tiongkok baru-baru ini telah menyuap pejabat pemerintah untuk mendapatkan surat kewarganegaraan, sementara mereka yang telah tinggal di negara itu selama beberapa dekade masih hanya memiliki identifikasi sementara yang tidak memberi

mereka hak dan akses yang sama ke layanan sebagai warga negara. Jelas ada risiko kekerasan antarkomunal, sesuatu yang telah lama menjadi perhatian pemerintah China (International Crisis Group, 2012).

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dijelaskan penulis di atas, maka rumusan masalahnya adalah **“Bagaimana inefektifitas UNHCR dalam menangani kasus Myanmar?”**

1.3. Tujuan Penelitian

Sebagaimana latar belakang permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah **“Mengetahui inefektifitas UNHCR dalam penanganan konflik Myanmar”**.

1.4. Studi Pustaka

1.4.1. Jason Miklian - Business, peacebuilding, violent conflict and sustainable development in Myanmar: presenting evidence from a news survey dataset Pada jurnal tersebut dijelaskan mengenai bagaimana Myanmar mengalami transformasi ekonomi dengan tidak seimbang sehingga menyebabkan ketidakstabilan yang mana perubahan menjadi bagian yang utama.

1.4.2. Sampa Kundu - Myanmar: Pangs of Democratic Transition

Pada jurnal tersebut dijelaskan bagaimana transisi demokrasi yang berkembang di Myanmar. Dimana kritik yang terjadi dari dunia internasional hadir untuk mengarahkan transisi demokrasi Myanmar.

1.4.3. Ashley South-Banyak pengungsi internal dan lainnya berpindah berulang kali, terkadang karena berbagai alasan; yang lain telah mengungsi selama beberapa waktu dan telah menemukan setidaknya solusi yang dapat bertahan lama terhadap penderitaan mereka; banyak di antara mereka yang tinggal bercampur dengan komunitas yang

1.4.4. tidak—atau belum pernah—menjadi pengungsi. Kebutuhan migran paksa dapat dinilai dan intervensi yang tepat dapat direncanakan hanya jika kompleksitas situasi pengungsian di Burma dapat dipahami. Oleh karena itu, para pelaku kemanusiaan (dan politik) harus menghormati dan menanggapi suara dan tindakan para migran yang dipaksa dan mendaftarkan partisipasi mereka dalam semua aspek perencanaan dan pelaksanaan program. Dalam sebagian besar kasus, migran paksa dan masyarakat yang terancam pengungsian memiliki kerentanan perlindungan khusus terkait dengan penyebab migrasi (khususnya konflik bersenjata dan konflik negara-masyarakat). Kekhawatiran ini menghubungkan kebutuhan kemanusiaan dengan isu-isu politik. Pada akhirnya, perlindungan yang substansial dan berkelanjutan dari migrasi paksa, serta rehabilitasi populasi pengungsi dan rekonstruksi masyarakat, bergantung pada resolusi konflik yang menyebabkan pengungsian di Burma. Sayangnya, upaya penyelesaian konflik sejauh ini hanya menemui sedikit keberhasilan (South et al., n.d.).

1.5. Kerangka Teori/Konseptual

Pada penelitian ini akan menggunakan pendekatan konstruktivis. Salah satu asumsi filosofis utama yang telah menyusun pemikiran dan praktik politik dan etika tentang hubungan internasional adalah gagasan bahwa negara modern adalah bentuk alami dari komunitas politik. Negara berdaulat telah 'diferetishisasi', menggunakan istilah Marx, sebagai mode normal dalam mengatur kehidupan politik. Namun, para ahli teori internasional yang kritis ingin mempermasalahkan fetetishisasi ini dan menarik perhatian pada 'defisit moral' yang diciptakan oleh interaksi negara dengan ekonomi dunia kapitalis. Pada bagian ini, saya menguraikan penyelidikan filosofis teori internasional kritis ke dalam dasar normatif kehidupan politik dan kritiknya terhadap partikularisme etis dan pengucilan sosial yang ditimbulkannya. Kritik filosofis partikularisme pertama kali, dan paling sistematis, ditetapkan dalam *Men and Citizens* karya Andrew Linklater. Perhatian utamanya di sana adalah untuk melacak bagaimana pemikiran politik modern telah secara terus-menerus membedakan kewajiban etis bagi sesama warga negara dari kewajiban-kewajiban umat manusia lainnya. Dalam praktiknya, ketegangan antara 'laki-laki' dan 'warga' ini selalu diselesaikan demi warga negara – atau, lebih tepatnya, anggota negara berdaulat tertentu. Bahkan jika diakui, seperti

yang dilakukan oleh sebagian besar pemikir modern awal, bahwa hak-hak universal tertentu dianggap berlaku untuk semua anggota komunitas manusia, hak-hak itu selalu bersifat residual dan sekunder dari hak-hak partikularistik. Laki-laki dan Kewarganegaraan, antara lain, sebuah karya pemulihan. Ia berusaha untuk memulihkan filosofi politik berdasarkan penalaran etis universal yang telah semakin terpinggirkan di abad kedua puluh, terutama dengan dimulainya Perang Dingin dan hegemoni realisme (Schieder & Spindler, 2014).

1.6. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menjelaskan ketidakefektifan UNHCR dalam menyelesaikan masalah kemanusiaan di Myanmar dalam menjalankan perannya untuk meningkatkan kesadaran akan nilai perdamaian terhadap orang-orang yang berkonflik. Analisis didasarkan pada dokumen-dokumen konvensi perlindungan manusia yang telah diratifikasi oleh Myanmar dan analisis dari sejumlah jurnal ilmiah yang diperoleh dari Mendeley.com dan Scopus.com. Analisis dilakukan secara bertahap dengan mengidentifikasi masalah konflik, pengungsi, dan kewarganegaraan etnis Rohingya, dan dilanjutkan dengan pilihan konflik yang tinggi dari pemerintah Myanmar sehingga arus pengungsi ke sejumlah negara Asia Tenggara, Asia Selatan, dan Indo China terus bertambah, yang kemudian menimbulkan masalah keamanan dengan sejumlah wilayah tersebut. Dilanjutkan dengan analisis mengenai pilihan UNHCR untuk mengelola masalah pengungsi di luar Myanmar lebih baik dan pilihan ASEAN yang masih belum bisa menyelesaikan masalah kemanusiaan di Myanmar.

1.7. Hipotesis

Eskalasi konflik Myanmar merambah sebagai konflik internasional disebabkan factor internal yang tidak stabil. Seperti ekonomi politik dan kebudayaan. Faktor-faktor tersebut bermuara sebagai konflik internasional dikarenakan banyak hal yang sifatnya kemanusiaan yang merupakan tanggungjawab dari pemerintah Myanmar justru berubah menjadi tanggungjawab dunia internasional. Dalam kasus Myanmar ini akan lebih ditekankan pada bagaimana UNHCR sebagai Lembaga yang menangani kemanusiaan di dunia internasional. Hal ini membawa pada hal yang lebih rumit. Pada kasus Myanmar ini aspek yang ditekankan lebih kepada arah resolusi konflik dengan pendekatan ekonomi yang sudah terjalin diantara

pemerintah dengan investor. Artinya dalam beberapa kesepakatan yang terjadi antara pemerintah Myanmar dengan investor ini mengakibatkan ketidakstabilan pada aspek sipil.

1.8. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan tesis ini terdiri dari empat bab yang dapat digunakan untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai keseluruhan isi penulisan penelitian. Kelimanya akan diuraikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, studi pustaka atau literature review, kerangka teori/konseptual, hipotesis, dan sistematika penulisan terkait terbentuknya UNHCR dan sejarah konflik Myanmar.

BAB II TENTANG KONDISI POLITIK MYANMAR DAN KONDISI PENGUNGSI MYANMAR

Pada bab ini, peneliti menguraikan gambaran terkait kondisi konflik Myanmar mulai dari kondisi politik Myanmar dan kondisi pengungsi Myanmar serta memaparkan bidang-bidang yang menjadi fokus UNHCR dan mitranya.

BAB III UPAYA PERDAMAIAN MYANMAR

Pada bab ini, penulis menjelaskan bagaimana upaya-upaya perdamaian Myanmar mulai dari upaya perdamaian politik dan upaya perdamaian lainnya.

BAB IV INEFEKTIVITAS UNHCR

Pada bab ini, peneliti akan membahas mengenai hasil penelitian dan analisis terkait ketidaefektifan UNHCR.

BAB V KESIMPULAN

Penulis akan memaparkan kesimpulan dari penelitian Inefektifitas UNHCR Dalam Penanganan Konflik Myanmar dalam bab ini.

